

**EVALUASI PROGRAM BANTUAN BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS NETRA MENGGUNAKAN MODEL  
COUNTENANCE STAKE**

***THE EVALUATION OF ASSISTANCE PROGRAMS FOR  
PEOPLE WITH NATIONAL DISABILITIES USING STAKE  
COUNTENANCE MODEL***

**Nopita Sitompul,**

Universitas Negeri Yogyakarta  
Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281  
nopitastp@gmail.com. HP 085292174478

**Sri Rahayu**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Kementerian Sosial RI  
Jl. Kesejahteraan Sosial 1 Sonosewu Yogyakarta. Indonesia Telpn (0274) 377265  
rahayuayu1507@gmail.com HP 085702024868  
Naskah diterima 8 Juni 2019, direvisi 10 Juli 2019, disetujui 2 Agustus 2019

**Abstract**

*The purpose of this study was to evaluate the accessibility of persons with visual impairments in Wiyata Guna Bandung. This research was an evaluation research using the Countenance Stake model. The data were collected using observation, interview and documentation techniques. The analysis technique used descriptive qualitative. The conclusions of the results of the study were as follows (1) planning for the provision of assistive devices for blind sensory disability services in the appropriate category (80%), found aids that did not pay attention to the aesthetics of body shape. (2) implementation of the provision of assistive devices in the sufficient category (60%), there was no compatibility between the assistive devices with the standard requirements of beneficiaries (body posture). (3) the use of assistive devices in the form of sticks and riglets was lacking because they were made from soft (easily broken), pen blunt and too sharp. (4) there were a contingency between planning, implementation and utilization, which implements the provision of aids in the sufficient category to cause beneficiaries to not yet used the aids.*

**Keywords: Program Evaluation, Stake's Countenance, Net Disability.**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi aksesibilitas penyandang disabilitas netra di Wiyata Guna Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan model Countenance Stake. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut (1) perencanaan pemberian alat bantu untuk layanan disabilitas sensorik netra dalam kategori sesuai (80%), ditemukan alat bantu yang tidak memperhatikan estetika bentuk tubuh. (2) pelaksanaan pemberian alat bantu dalam kategori cukup (60%), belum adanya kesesuaian antara alat bantu dengan standar kebutuhan penerima manfaat (postur tubuh). (3) pemanfaatan alat bantu berupa tongkat dan riglet kurang karena berbahan lunak (mudah patah), pen tumpul dan terlalu lancip. (4) terdapat contingency antara perencanaan, pelaksanaan dengan pemanfaatan, yang pelaksanaan pemberian alat bantu pada kategori cukup menyebabkan penerima manfaat belum memanfaatkan alat bantu.

**Kata kunci: Evaluasi Program, Countenance Stake, Disabilitas Netra.**

## A. PENDAHULUAN

Disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik ataupun mental yang memerlukan bantuan sarana dan prasarana khusus dalam menjalankan aktivitasnya. Penyandang disabilitas merupakan salah satu orang yang tidak lepas dari bantuan orang lain maupun aksesibilitas yang ada. Di Indonesia sebanyak 23 juta penduduk mengalami disabilitas, sehingga membutuhkan fasilitas, baik transportasi, trotoar, toilet maupun gedung ramah disabilitas. Menurut pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, sehingga setiap orang tidak seharusnya membeda-bedakan kekurangan yang dimiliki setiap individu yang satu dengan yang lainnya. Hak disabilitas tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 atau Konvensi PBB untuk Hak-hak Penyandang Disabilitas. Selain itu Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Penyandang Disabilitas memiliki hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; dan politik.

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) mendefinisikan disabilitas sebagai hasil interaksi antara penyandang ketunaan dengan hambatan sikap dan hambatan lingkungan yang menghambat partisipasi difabel tunanetra secara penuh dan efektif dengan orang-orang lain di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan. Pengertian dari CRPD tersebut mengindikasikan bahwa disabilitas bukan merupakan suatu hambatan bagi orang yang memiliki kelainan fisik untuk melakukan berbagai aktifitas seperti layaknya orang normal. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD menetapkan hak penyandang secara luas yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan

yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. CRPD menetapkan kewajiban umum setiap Negara, disamping kewajiban yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi, artinya seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia serta peraturan dibawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi dalam ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul pasalnya.

Wujud nyata perhatian pemerintah dalam menangani masyarakat berkebutuhan khusus jenis difabel tunanetra dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas maka kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek (diakui keberadaannya) yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara. Melalui pijakan peraturan perundang-undangan ini pemerintah mengajak semua pihak untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi.

Perhatian pemerintah yang dituang dalam UU diaktualisasikan dengan mengadakan program pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas yang tinggal di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra. Salah satu kota yang dipercaya adalah Kota Bandung yaitu BBRSPDSN Wiyata Guna. BBRSPDSN Wiyata Guna merupakan unit pelaksana teknis penyedia akomodasi untuk penyandang disabilitas netra guna mewujudkan kesamaan kesempatan untuk menjamin dan menjalankan fungsi sosial dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan. Sebagai pusat rehabilitasi difabel tunanetra, dianggap telah menyediakan semua kebutuhan difabel tunanetra

sesuai standar pelayanan baik rehabilitasi sosial maupun keterampilan. Namun hingga saat ini belum ada yang mengevaluasi aksesibilitas layanan disabilitas netra di Wiyata Guna Bandung. Oleh karena itu dilakukan penelitian terkait “evaluasi program pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas netra menggunakan model *countenance stake* di BBRSPDSN Wiyata Guna Bandung” untuk melihat efektifitas BBRSPDSN Wiyata Guna dalam memberi layanan rehabilitasi bagi difabel tunanetra dengan menggunakan metode evaluasi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi deskriptif dengan modevaluasi yang digunakan adalah *countenance stake*. Model evaluasi *countenance stake* adalah model evaluasi yang mengutamakan dua poin, yaitu *decription* dan *judgment* serta membedakan tiga fase dalam evaluasi program: pertama, persiapan (*antecedents*) dalam hal ini adalah perencanaan berupa persiapan, legalitas dan SOP. Kedua, transaksi adalah pelaksanaan program (kesesuaian prosedur dengan pelaksanaan), ketiga, *outcome* dari program ini adalah aksesibilitas penyandang disabilitas netra. *Description* terdiri atas dua aspek, yaitu *intents (goals)* dan *observation (effects)* atau yang sebenarnya terjadi, sedangkan *judgment* terdiri dari dua aspek, yaitu *standard* dan *judgment*. Ketiga dimensi di atas (*antecedents, transactions, outcomes*) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan yang sebenarnya tetapi juga dibandingkan dengan standar absolut untuk menilai manfaat program secara keseluruhan (Rusdiana, 2017: 47).

Sasaran evaluasi adalah orang penyandang disabilitas netra yang ada di Wiyata Guna Bandung dipilih secara teknik *purposive sampling*. Subyek utama dalam penelitian ini adalah para penyandang disabilitas sensorik dan penyedia layanan bagi penyandang disabilitas diantaranya panti sosial penyandang disabilitas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan evaluasi adalah observasi, wawancara, studi dan dokumen. Teknik observasi menggunakan *check-list* terkait *observasi* dalam

kesesuaian implementasi program dengan prosedur, legalitas dan SOP. Teknik observasi digunakan untuk menggalidatalayanan aksesibilitas penyandang disabilitas netra yang ditinjau dari tiga aspek yaitu persiapan, keterlaksanaan dan kebermanfaatannya. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi kualitatif terkait kendala yang dihadapi oleh pelaksana layanan aksesibilitas penyandang disabilitas netra, serta kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses layanan. Wawancara juga dilakukan untuk menggali informasi terkait peran berbagai pihak dalam layanan penyandang disabilitas. Studi dokumen dilaksanakan untuk menggali kelengkapan dokumen terkait layanan penyandang disabilitas. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk menggali data penunjang, baik berupa data sekunder yang disediakan lembaga terkait (BPS/ dinkes/Kemensos/lainnya), laporan yang pernah dibuat oleh pelaksana /petugas pendamping, hasil penelitian yang relevan maupun dokumen terkait yang lain.

Analisis data secara deskriptif kualitatif berupa persentase untuk menggambarkan layanan aksesibilitas penyandang disabilitas netra dilihat dari aspek persiapan, kesesuaian dan *outcome*. Dalam analisis tematik ditempuh alur analisis dari pengumpulan data, reduksi data dan kesimpulan verifikasi. Data penilaian pelaksanaan pemberian alat bantu akan dianalisis secara statistik deskriptif dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut:

$$\text{Nilai perolehan} = \frac{\text{Skor Mentah}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$$

Nilai perhitungan persentase (%) dikonversi dalam bentuk kualitatif untuk menentukan aktualisasi ketercapaian. Seperti dibawah berikut.

Tabel 1. Konversi Hasil Perhitungan Ketercapaian Program

No	Skala Persentase	Kategori Nilai students	Predikat Hasil Evaluasi
1	$85 \leq NA \leq 100$	A	Amat Baik
2	$70 \leq NA < 85$	B	Baik
3	$56 \leq NA < 70$	C	Cukup
4	$NA < 56$	D	Kurang

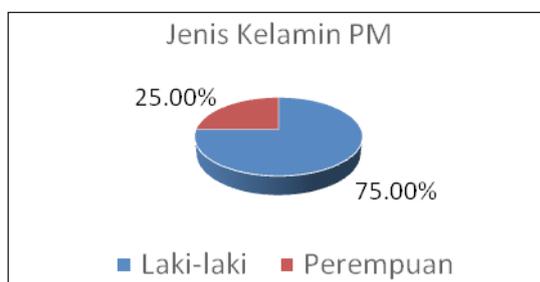
(Arikunto, 2008, Hal. 8)

Persentase capaian skor menunjukkan seberapa besar keterlaksanaan pemberian alat bantu bagi penerima manfaat disabilitas netra di Wiyata Guna Bandung. Besarnya persentase capaian skor digunakan mendeskripsikan kesesuaian antara standar proses pemberian alat bantu yang telah ditetapkan dengan hasil yang ditemukan di lapangan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Deskripsi Penerima Manfaat Pelayanan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Wiyata Guna Bandung

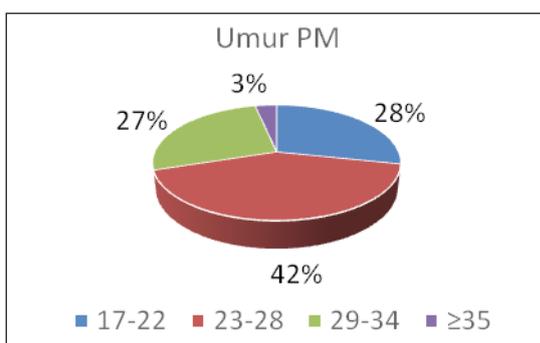
##### Jenis kelamin PM



Gambar 1. Jenis Kelamin Penerima Manfaat

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa jumlah penerima manfaat berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 75% lebih banyak dibandingkan penerima manfaat berjenis kelamin perempuan yaitu 25%. Dari data diperoleh informasi bahwa penghuni balai Wyata Guna disabilitas sensorik netra didominasi oleh kaum laki-laki.

##### Usia PM



Gambar 2. Umur Penerima Manfaat

Dari hasil tabel dan gambar di atas disajikan data bahwa usia penerima manfaat yang berada di balai Wiyata Guna Bandung di dominasi penerima manfaat usia 23-28 tahun yaitu sebanyak 42%, kedua pada rentang usia 17-22 tahun yaitu 28%, ketiga pada rentang usia 29-34 tahun yaitu 27%.

### Pendidikan PM

Tabel 2. Pendidikan Terakhir Penerima Manfaat

PENDIDIKAN TERAKHIR			
Kode	Pendidikan Terakhir	F	%
1	Tidak Sekolah	2	3.33%
2	Belum/Tidak Tamat SD/Sederajat	12	20.00%
3	SD/MI/Sederajat	0	0.00%
4	SMP/MTs/Sederajat	13	21.67%
5	SMA/SMK/MA/Sederajat	33	55.00%
Jumlah		60	100.00%

Tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat pendidikan penerima manfaat di balai Wyata Guna didominasi penerima manfaat dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat yaitu 55%, kedua tingkat SMP/ sederajat sebanyak 21.67%, ketiga pada kategori belum/ tidak tamat SD sebanyak 20% dan terakhir pada kategori tidak sekolah yaitu sebesar 3,33%.

### Pekerjaan PM

Tabel 3. Pekerjaan Penerima Manfaat Sebelum Masuk Balai

PEKERJAAN			
Kode	Jenis Pekerjaan	Utama	
		F	%
2	Buruh/Karyawan/Pegawai Tetap	2	3.33%
3	Buruh/karyawan tidak tetap	11	18.33%
4	Tidak Bekerja	47	78.33%
Jumlah		60	100.00%

Tabel di atas menyajikan informasi pekerjaan penerima manfaat yang berada di balai Wiyata Guna Bandung, sebesar 78,33% penerima manfaat disabilitas sensorik netra tidak memiliki pekerjaan, sebesar 18,33% pada kategori buruh/ karyawan tidak tetap sebelum masuk ke balai Wiyata Guna Bandung dan terakhir pekerjaan penerima manfaat sebelum masuk ke balai adalah sebagai karyawan tetap sebanyak 3.33%.

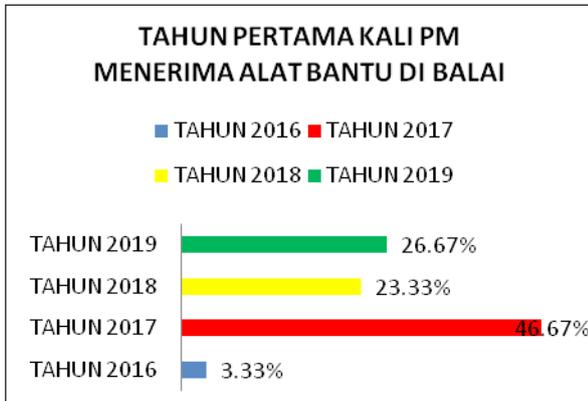
### Status perkawinan PM

Tabel 4. Status Perkawinan Penerima Manfaat

STATUS PERKAWINAN			
Kode	Status Perkawinan	F	%
1	Belum Kawin	58	96.67%
2	Kawin	1	1.67%
3	Cerai Hidup	1	1.67%
4	Cerai Mati	0	0.00%
Jumlah		60	100.00%

Tabel menyajikan informasi bahwa sebagian besar penerima manfaat disabilitas sensorik netra di balai Wyata Guna berstatus belum kawin yaitu sebanyak 96,67%, kedua status kawin yaitu 1,67%, ketiga status cerai hidup sebanyak 1,67%.

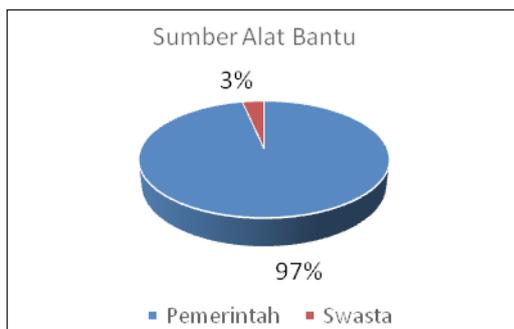
### Tahun menerima bantuan



Gambar 3. Awal Penerima Manfaat Menerima Bantuan Alat Bantu

Berdasarkan tabel dan gambar di atas disajikan informasi bahwa penerima manfaat disabilitas sensorik netra di balai Wiyata Guna sebagian besar memperoleh data pada tahun 2017 yaitu sebanyak 46,67%, kedua pada tahun 2019 yaitu 26,67%, ketiga pada tahun 2018 yaitu 23,33% dan terakhir pada tahun 2016 yaitu 3,33%

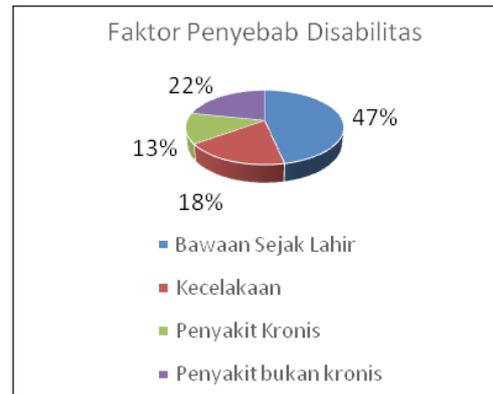
### Sumber bantuan



Gambar 4. Sumber Bantuan

Dari tabel dan gambar di atas diperoleh informasi bahwa alat bantu untuk disabilitas sensorik netra di balai Wiyata Guna berasal dari pemerintah yaitu 97%, dan sisanya 3% berasal dari swasta.

### Faktor penyebab disabilitas



Gambar 5. Faktor Penyebab Disabilitas Penerima Manfaat

Tabel dan gambar di atas menyajikan informasi bahwa faktor penyebab disabilitas penerima manfaat disabilitas sensorik netra di balai Wiyata Guna sebagian besar oleh bawaan lahir (47%), kedua kecacatan yang dialami disabilitas sensorik netra disebabkan oleh penyakit bukan kronis (panas tinggi, glukoma) (22%), ketiga disebabkan oleh kecelakaan (18%), terakhir disebabkan oleh penyakit kronis (*over dosis obat*, dan *over dosis obat terlarang*) (13%)

### Kategori Penerima Manfaat

Tabel 5. Kategori Penerima Manfaat

Kode	Kategori PM	F	%
1	Mandiri Produktif	15	25.00%
2	Mandiri tidak produktif	45	75.00%
		60	100%

Dari hasil wawancara dengan penerima manfaat dan pengumpulan data melalui angket diperoleh gambaran seperti pada tabel dan gambar di atas, bahwa penerima manfaat disabilitas sensorik netra yang berada di balai Wiyata Guna merupakan penerima manfaat pada kategori mandiri tidak produktif sebanyak 75% dan mandiri produktif sebesar 25%.

## 2. Evaluasi Pemanfaatan Alat Bantu Untuk Pelayanan Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Persiapan (*Antecedents*)

Hasil penelitian setiap tahapan evaluasi disajikan pada matriks *Countenance Stake* pada tabel yang meliputi intens, observasi, standar dan *judgment* untuk masing-masing komponen pelaksanaan pemberian alat bantu bagi disabilitas netra di Wiyata Guna Bandung dengan hasil yang ditemukan di lapangan.

### Komponen Antecedent

Komponen yang dapat dievaluasi pada *antecedent* adalah SOP. Berikut ini disajikan *countenance matrix* komponen *antecedent* seperti di bawah ini.

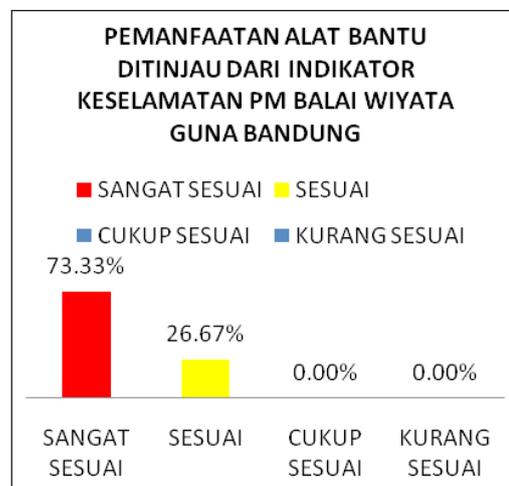
Tabel 6. *Countenance Matrix* Komponen *Antecedent*

Description Matrix		Judgment Matrix	
Intens	Observasi	Standar	Judgment
SOP	Aktualisasi	Pemberian alat bantu melalui asesemen	S e b a g a i n
Pemberian alat bantu melalui asesemen dan wawancara, sebanyak 80% melalui rujukan pekerja sosial, alat bantu pemeriksaan medis, pemberian alat bantu melalui pemeriksaan aspek medis, pemberian alat bantu , melalui pengukuran, alat bantu sesuai dengan jenis,ukuran, tingkat disabilitas, dan berkualitas baik, alat bantu mendapat perawatan secara rutin,	Ketercapaian SOP dan wawancara, sebanyak 80% melalui rujukan pekerja sosial, alat bantu pemeriksaan aspek medis, pemberian alat bantu melalui pengukuran, dengan kriteria yang telah ditetapkan.	dan wawancara, pemberian alat bantu melalui rujukan pekerja sosial, alat bantu pemeriksaan medis, melalui pengukuran, alat bantu sesuai dengan jenis,ukuran, tingkat disabilitas, dan berkualitas baik, alat bantu mendapat perawatan secara rutin, memiliki standar pelayanan (SOP), daerah mempunyai UU atau Perda tentang pemanfaatan alat bantu.	

Berdasarkan tabel di atas, SOP yang ada di balai termasuk dalam kategori sangat sesuai. Kesesuaian intens dengan observasi, pada matriks deskripsi ditemukan belum adanya kesesuaian antara ketersediaan SOP yang dibuat balai dengan SOP yang dibuat oleh peneliti terutama pada komponen pemberian alat bantu melalui pengukuran, alat bantu yang diberi tidak berkualitas baik, tidak ada perawatan secara rutin, alat bantu yang diberi tidak sesuai dengan estetika penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dijelaskan bahwa SOP pemanfaatan alat bantu yang diberikan balai ke penerima manfaat mengikuti prosedur atau standar pabrik. Hal ini menyebabkan tongkat sebagian pengguna tidak sesuai dengan ukuran postur tubuh, ada yang pendek dan ada yang kepanjangan (tubuh pendek), diinformasikan juga bahwa tongkat yang diberikan mudah patah dan kurang berkualitas. Untuk riglet dan pen dianggap masih kurang baik karena terkadang mudah patah dan pen terkadang terlalu lancip dan terlalu tumpul, sehingga menyulitkan pengguna memanfaatkan alat. Dengan demikian, balai Wiyata Guna perlu memperluas jaringan untuk mendalami terkait alat bantu khusus sensorik netra, agar mendapatkan informasi dan pengalaman yang akurat dalam penyediaan alat bantu yang berkualitas baik.

### 3. Evaluasi Pemanfaatan Alat Bantu Untuk Pelayanan Penyandang Disabilitas ditinjau dari Fase Pelaksanaan

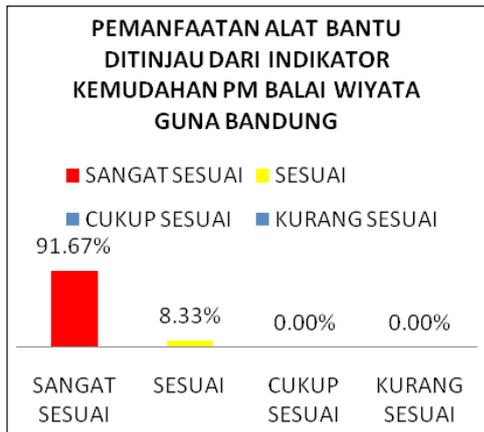
#### Aspek Keselamatan



Gambar 6. Pemanfaatan Alat Bantu Ditinjau dari Indikator Keselamatan Penerima Manfaat

Indikator keselamatan penerima manfaat dalam menggunakan alat bantu, sesuai dengan gambar di atas menyebutkan sebesar 73,33% pada kategori sesuai. Artinya alat bantu yang diterima sesuai dengan kebutuhan, namun hasil wawancara menjelaskan bahwa kualitas tongkat dan riglet pen dari balai masih perlu ditingkatkan agar keselamatan pengguna terjamin dan aman.

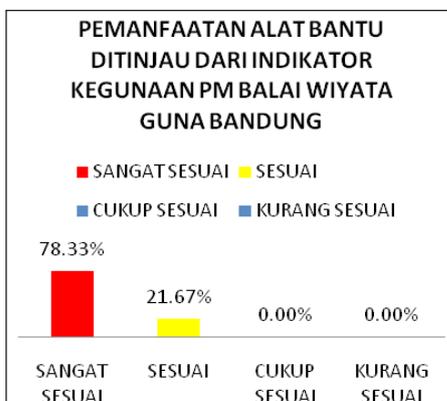
**Aspek Kemudahan**



Gambar 7. Pemanfaatan Alat Bantu Ditinjau dari Indikator Kemudahan Penerima Manfaat

Indikator kemudahan penerima manfaat dalam mendapatkan alat bantu sesuai dengan gambar di atas menjelaskan sebesar 91,67% pada kategori sangat sesuai. Artinya penerima manfaat sangat mudah dalam memperoleh alat bantu, karena balai memberikan alat bantu kepada penerima manfaat yang diterima di balai. Selain kemudahan difabel tunanetra mendapatkan alat bantu yang melekat pada dirinya, difabel tunanetra yang tinggal di balai juga mendapatkan fasilitas lingkungan. Sesuai peraturan menteri PU No 30 tahun 2006, tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan kepada kaum difabel seperti gudingblock, artifak/arsitektur yang menggunakan huruf braille di handel tangga, warning block di jalan sekitar balai. Semua ini agar fasilitas yang ada di dalam balai sesuai dengan prinsip aksesibilitas berupa keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian (Syafii ie', 2014)

**Aspek Kegunaan**

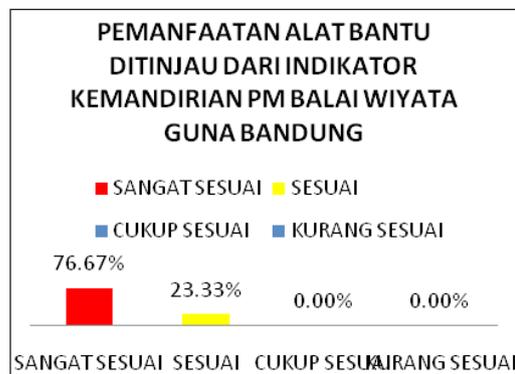


Gambar 8. Pemanfaatan Alat Bantu Ditinjau dari Indikator Kegunaan Penerima Manfaat

Untuk indikator kegunaan alat bantu yang diterima dari balai, sesuai dengan gambar di atas

dijelaskan pada kategori sesuai (78,33%), namun pada hasil wawancara terhadap penerima manfaat dan keluarga dijelaskan tongkat dan riglet penyang yang diterima dari balai masih kurang berkualitas, karena mudah patah, karet tidak kuat sebagai pegangan, riglet mudah patah karena terbuat dari plastik dan pendek. Informasi lainnya menyebutkan bahwa pada saat pemberian alat bantu pihak balai tidak melakukan pengukuran postur tubuh untuk kesesuaian tongkat, hal tersebut menyebabkan tongkat yang tidak sesuai dengan postur tubuh penerima manfaat jarang atau tidak digunakan.

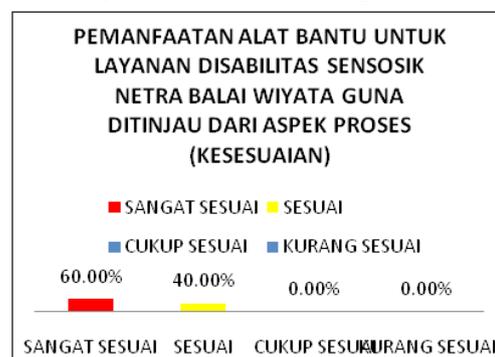
**Aspek Kemandirian**



Gambar 9. Pemanfaatan Alat Bantu Ditinjau dari Indikator Kemandirian Penerima Manfaat

Dari gambar di atas diinformasikan bahwa indikator kemandirian penerima manfaat pada kategori sesuai (76,67%), namun hal ini berlaku bagi penerima manfaat disabilitas sensorik netra kategori *low vision*. Penerima manfaat kategori *low vision* masih mampu untuk melakukan kegiatan/aktivitas keseharian tanpa bantuan dari orang lain. Sementara disabilitas sensorik netra buta total, masih bergantung pada orang lain.

**Proses Pemanfaatan Alat Bantu Untuk Layanan Disabilitas Sensorik Netra Di Balai Wiyata Guna Bandung**



Gambar 10. Pemanfaatan Alat Bantu Ditinjau dari Aspek Proses (Kesesuaian)

### Komponen *Transaction*

Komponen yang dievaluasi pada *transaction* adalah kegiatan pelaksanaan pemanfaatan alat bantu untuk layanan disabilitas sensorik netra di

balay Wiyata Guna Bandung yang ditinjau dari aspek kesesuaian. Dapat disajikan *countenance matrix* komponen *transaction* pada tabel di bawah ini.

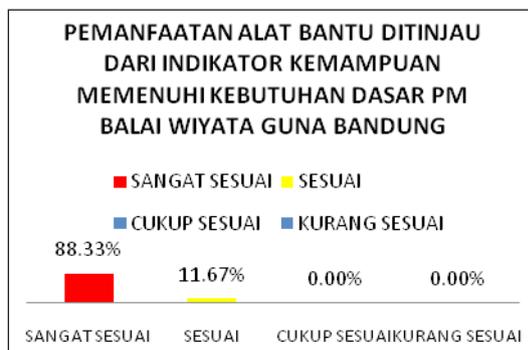
Tabel 7. *Countenance Matrix* Komponen *Transaction*

Description Matrix		Judgment Matrix	
Intens	Observasi	Standar	Judgment
Pelaksanaan pemanfaatan alat bantu Balai dapat melaksanakan pemberian alat bantu sesuai dengan standar	Aktualisasi ketercapaian pelaksanaan pemberian alat bantu untuk pelayanan disabilitas sensorik netra adalah 70% dalam kategori sesuai. Belum semua standar (SOP) dilaksanakan oleh balai dalam pemanfaatan alat bantu.	Pelaksanaan pemanfaatan alat bantu meliputi: Aspek kesesuaian yang terdiri dari: Indikator keselamatan Indikator kemudahan Indikator kegunaan Indikator kemandirian	Keterlaksanaan setiap indikator yang dimulai dari indikator keselamatan dalam pelaksanaannya pada kategori sesuai yaitu 73,33%. Indikator kemudahan mencapai 91,67% pada kategori sangat sesuai. Indikator kegunaan alat bantu pada 78,33% dengan kategori sesuai. Indikator kemandirian yaitu 76,67% pada kategori sesuai. Untuk kesesuaian pemanfaatan alat ditinjau dari empat indikator berada pada kategori sangat sesuai.

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa aktualisasi ketercapaian pelaksanaan pemanfaatan alat bantu untuk layanan disabilitas sensorik netra di balai Wiyata Guna dalam kategori cukup sesuai (60,00%). Namun demikian pada wawancara dengan penerima manfaat menjelaskan bahwa tingkat dan riglet yang diterima dari balai tidak terbuat dari bahan yang kuat, dan tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dalam hal ini tingkat tidak sesuai dengan postur tubuh penerima manfaat sehingga sebagian tingkat ada yang tidak digunakan.

#### 4. Evaluasi Pemanfaatan Alat Bantu Untuk Pelayanan Penyandang Disabilitas ditinjau dari Fase hasil (*Outcomes*)

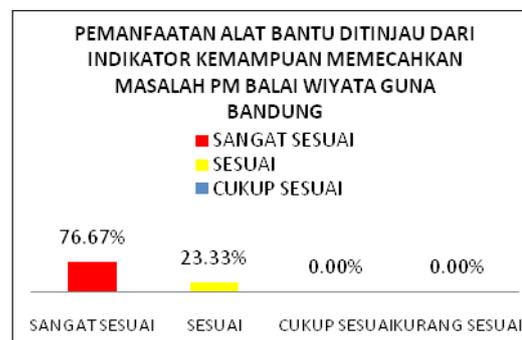
##### Aspek kemampuan memenuhi kebutuhan dasar



Gambar 11. Pemanfaatan Alat Bantu Ditinjau dari Indikator Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Dasar Penerima Manfaat

Dari gambar di atas dijelaskan bahwa indikator kemampuan memenuhi kebutuhan dasar oleh penerima manfaat pada kategori sangat sesuai (88,33%), namun ketika hasil wawancara dengan penerima dan keluarga penerima manfaat masih dianggap kurang karena pada data jenis pekerjaan para penerima manfaat sebelum masuk kebalai sebagian besar adalah pengangguran atau tidak bekerja. Di balai penerima manfaat menerima secara gratis kebutuhan dasar seperti makan, minum, peralatan mandi, keperluan pribadi dan lainnya.

##### Aspek kemampuan memecahkan masalah

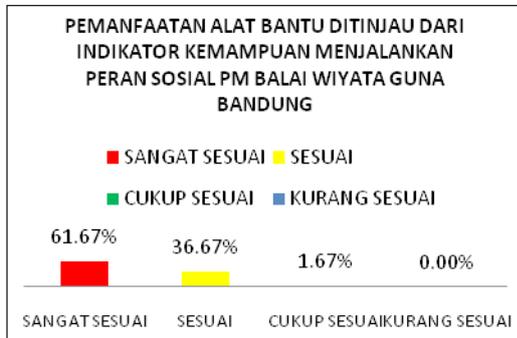


Gambar 12. Pemanfaatan Alat Bantu Ditinjau dari Indikator Kemampuan Memecahkan Masalah Penerima Manfaat

Gambar di atas menyajikan informasi bahwa indikator kemampuan memecahkan masalah oleh penerima manfaat pada kategori sesuai (76,67%), namun pada hasil wawancara dengan penerima manfaat dan keluarga dijelaskan bahwa penerima

manfaat pada situasi tertentu masih membutuhkan bantuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi penerima manfaat.

**Aspek kemampuan menjalankan peran sosial**



Gambar 13. Pemanfaatan Alat Bantu Ditinjau dari Indikator Kemampuan Menjalankan Peran Sosial Penerima Manfaat

Berdasarkan gambar di atas diinformasikan bahwa indikator kemampuan menjalankan peran sosial oleh penerima manfaat di balai pada kategori cukup sesuai (61,67%), meski demikian dari hasil wawancara terhadap penerima manfaat dan keluarga PM dijelaskan bahwa penerima manfaat masih kurang aktif dalam menjalankan peran sosial di lingkungan tempat tinggal.

**Hasil (kebermanfaatan) pelaksanaan pemanfaatan alat bantu untuk layanan Disabilitas Sensorik Netra Balai Wiyata Guna Bandung**



Gambar 14. Pemanfaatan Alat Bantu Ditinjau dari Aspek Proses (Kebermanfaatan)

**Komponen outcome**

Komponen yang dievaluasi adalah kebermanfaatan alat bantu yang diberikan untuk pelayanan disabilitas sensorik netra di balai Wiyata Guna Bandung. Berikut ini disajikan *countenance* matriks komponen *outcome*. Dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8. *Countenance Matrix* Komponen *Outcomes*

Description Matrix		Judgment Matrix	
Intens	Observasi	Standar	Judgment
Hasil / kebermanfaatan alat bantu.	Aktualisasi ketercapaian pemanfaatan alat bantu adalah 70,00% dalam kategori cukup baik. Walau demikian sebagian penerima manfaat kurang memanfaatkan tongkat ketika beraktivitas di dalam balai maupun di lingkungan tempat tinggal, karena merasa malu dan kurang percaya diri.	Untuk pemanfaatan alat harus 100% dimanfaatkan.	Hasil pengumpulan data di balai Wiyata Guna Bandung khusus disabilitas sensorik netra masih kurang memanfaatkan alat bantu berupa tongkat karena masih kurang percaya diri, disamping itu sebagian penerima manfaat masih pada kategori <i>low vision</i> sehingga tidak membutuhkan tongkat apalagi ketika berada di lingkungan balai, karena sudah menghafal letak-letak bangunan yang ada di lingkungan balai.

Belum semua penerima manfaat menggunakan atau memanfaatkan alat bantu pemberian balai khususnya tongkat. Karena menurut penerima manfaat yang pada kategori *low vision* masih mampu beraktivitas tanpa menggunakan tongkat di lingkungan balai, namun

ketika di luar lingkungan balai penerima manfaat membutuhkan tongkat untuk sarana dalam mobalitas. Sebagian penerima manfaat berjenis kelamin laki-laki lebih memilih tidak menggunakan tongkat ketika bepergian, karena menurut mereka tongkat membuat mereka kurang percaya diri,

mera malu karena sorotan mata orang sekitar yang tidak mengetahui keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas sensorik netra.

### Contingency

Keterhubungan antara *antecedent* dengan *transaction*, *transaction* dengan *outcome* dan *antecedent*, *transaction* dan *outcomes*, baik pada intens dan observasi, semua hasil evaluasi dalam kategori sangat sesuai. Hal ini sesuai dengan fenomena hasil observasi bahwa masih ada sebagian SOP yang belum diterapkan dan daktulisasikan ketika pemberian manfaat alat bantu untuk layanan disabilitas sensorik netra di balai Wiyata Guna Bandung. Penerima manfaat yang tidak memanfaatkan alat bantu yang diberi oleh balai, karena alasan kurang sesuainya tongkat dengan postur tubuh penerima manfaat, juga belum tumbuhnya rasa percaya diri dan belum dapat menerima kekurangan pada diri si penerimamanfaat, sehingga malu dan kurang percaya diri dalam menggunakan tongkat ketika bepergian di luar balai maupun sekitar lingkungan. Disamping itu penghuni balai disabilitas sensorik netra di balai sebagai disabilitas sensorik netra kategori *low vision* sehingga tidak terlalu membutuhkan tongkat ketika berada di balai.

### D. SIMPULAN

Simpulan penelitian ini sebagai berikut: (1) perencanaan pemberian alat bantu untuk layanan disabilitas sensorik netra dalam kategori sesuai (80%), namun perlu memperhatikan estetika dalam pemberian bantuan kepada penerima manfaat. (2) pelaksanaan pemberian alat bantu dalam kategori cukup sesuai (60%), (3) ketercapaian pemanfaatan alat bantu adalah 70,00% dalam kategori cukup baik, ditemukan penggunaan alat bantu belum sesuai dengan harapan, karena alat bantu sebagian tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat (postur tubuh), disamping itu sebagian disabilitas sensorik netra di balai pada kategori *low vision* sehingga pada saat tertentu tongkat tidak diperlukan. Tongkat dan *riglet* tidak berbahan yang kuat, sehingga penerima manfaat terkadang membeli tongkat dan *riglet* sendiri. Untuk alat bantu *riglet* dan *pen* terkadang mudah patah karena terbuat dari plastik, untuk

*pen* terkadang tumpul dan terkadang terlalu lancip sehingga mempersulit penerima manfaat memanfaatkan alat bantu.

Rekomendasi dari penelitian ini Berdasarkan analisis *congruences* dan *contingency*, direkomendasikan sebagai berikut. Pertama, perencanaan pemberian alat bantu untuk layanan disabilitas sensorik netra di balai Wiyata Guna Bandung perlu mempertimbangkan estetika penerima manfaat dengan kondisi (postur tubuh). Balai perlu memperluas jaringan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman terkait pengadaan alat bantu bagi disabilitas sensorik netra di balai Wiyata Guna Bandung. Kedua, pelaksanaan pemberian alat bantu hendaknya mengacu pada SOP yang disesuaikan dengan UU dan Perda yang ada di wilayah masing-masing. Ketiga, pemanfaatan alat bantu seharusnya dipergunakan untuk membantu penerima manfaat menjangkau mobilitas yang ada di balai, lingkungan tempat tinggal maupun luar balai. Balai diharapkan dapat bekerjasama dengan psikolog untuk mengetahui dan memotivasi penerima manfaat dalam menerima keterbatasannya dan mendorong penerima manfaat lebih percaya diri dalam menjalani hidup.

### E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini, pembimbing yang selalu memberikan arahnya sehingga naskah ini dapat terselesaikan, tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih dengan harapan agar tulisan ini bermanfaat untuk menjadi literature dalam penulisan yang lain

### Daftar Pustaka

- Chambers, D., Wedel, K., and Rodwell, M. (1981). *Evaluating Social Programs*. New York, USA: Boston: Allyn & Bacon.
- Bappenas. (2009). *Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral*. Jakarta: Bappenas RI
- Frye, Ann & Hemmer A. Paul (2012). *Program Evaluation Models and Related Theories: AMEE guide no 67*. NCBI.
- Ghozali. (2008). *SEM Metode Alternatif dengan*

- Partial Least Square*. Edisi 2. Semarang : BP-Undip
- <http://presiden.ri.go.id>, tanggal 23 Pebruari 2017
- Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). *Lisrel 8: Structural Equations Modeling with the SIMPLIS command language*. Chicago: Scientific Software International.
- Krejce, Robert V & Morgan, Darley. (1970). Determining Sample Size For Research Activities in *Educational and Psychological Measurement Journal*, Edition 30, 1970 P.607-610. Duluth: University of Minnesota.
- Kusnendi. 2008. *Model-Model Persamaan Struktural*. Satu dan Multi-group Sample dengan LISREL. Bandung : Alfabeta
- Milles, M.B & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: An Expanded sourcebook*. Newyork: SAGE Publication.
- Rossi, Petter H & Freeman, Howard. (1985). *Evaluation: A Systematic Approach. Third Edition*. Beverly Hills, CA: Sage Publication.
- Syafi ie', M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Inklusi*, Vol I, No. 2 Juli-Desember 2014.
- Samsul hadi dan Mutrofin. (2006). *Pengantar Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: PT.Kurnia Kalam Semesta.
- Sax, G. (1980). Principles of educational and psychological measurement and evaluation, (2<sup>nd</sup> ed.). California: Wandsworth Publishing Company.
- Stufflebeam, D.L., & Shinfield, A.J. (1985). *Systematic evaluation*. Boston: Kluwer Nijhof Publishing.
- Undang-Undang RI No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang RI No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD
- Undang-Undang RI No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Wahyuni, Sri & Murti, Bhisma dkk (2019). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Publik. [Perpustakaan.uns.ac.id](http://Perpustakaan.uns.ac.id).
- World Bank (1986). *Sustainability of ProJects: Review of Experience in The Fertilizer Subsector*. Februari 26. Washington DC: Word Ban

